

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori utama yang menjadi dasar mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan dengan teori agensi. Jensen, 1976 (Nugroho, 2014) menyatakan bahwa “Hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen”. Prinsip utama teori ini menyatakan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima wewenang (disebut agen). Dalam suatu hubungan kerja, yakni antara investor (sebagai prinsipal) dengan manajer (sebagai agen).

Pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik antara prinsipal dengan agen. Agen mempunyai tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun agen juga berkepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhannya. Hal ini yang menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik juga dapat terjadi karena pemerintah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat tidak bertindak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 mendefinisikan pemeriksaan adalah “Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini, temuan audit serta simpulan dalam bentuk rekomendasi

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja adalah pencapaian atas perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran baik oleh pribadi maupun organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa “Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Menurut (Sutrisno, 2010:67) kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengungkapkan bahwa:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut (Fahmi, 2012: 2) “Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “Gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013:25). Tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi, 2017:140):

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode – periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Menurut (Mardiasmo, 2017), manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan adalah:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Pengukuran kinerja merupakan ukuran untuk memperoleh nilai dari hasil yang telah dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan atas APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Menurut (Mahmudi, 2017:140) “Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah terhadap pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi”.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Disajikan kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

Persentase PAD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Nurhayati, 2015).

Pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2014:126):

- a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- b. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- c. Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun obligasi.

Berdasarkan teori – teori yang telah dijabarkan diatas dapat dinyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah pencapaian atas hasil yang telah ditetapkan dan dapat diukur salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah.

### 2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran adalah suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Jika objek tertentu dikaitkan dengan instansi atau organisasi, ukuran dapat dilihat secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. Pemerintah daerah dengan ukuran (*size*) yang besar akan menunjang operasional dan juga memberi kelancaran dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kusumawardani, 2012).

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan rumus : berdasarkan penelitian (Kusuma dan Nurhandayani, 2017) :

$$\text{Size} = \text{Total Aset daerah}$$

### 2.1.4 Tingkat Kekayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengungkapkan bahawa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

Berdasarkan pada pengetahuan-pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat diproyeksikan dengan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan jumlah pendapatan asli daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya dan juga sebaliknya. Semakin rendah

tingkat kekayaan daerah maka akan semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat Kekayaan Daerah dapat diukur dengan rumus : berdasarkan penelitian (Anggraini dkk, 2019) :

$$\text{PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### 2.1.5 *Intergovernmental Revenue*

*Intergovernmental revenue* adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Setyaningrum dan Febriyani, 2012). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Simanullang, 2013).

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

*Intergovernmental Revenue* dapat diukur dengan rumus : (Mahmudi, 2017:140):

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 2.1.6 Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mendefinisikan “Belanja Daerah adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Dapat dinyatakan bahwa belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan daerah yang baik dan dapat mengatur pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya.

Belanja Daerah dapat diukur dengan rumus : berdasarkan penelitian (Kusuma dan Nurhandayani, 2017):

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Ln (Total Realisasi Belanja Daerah)}$$

### 2.1.7 Temuan Audit BPK

Menurut (Sudarsana, 2013) Temuan audit BPK adalah “Berbagai jenis tindak kecurangan yang ditemukan pada laporan keuangan pemerintah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang melanggar ketentuan pengendalian internal dan ketentuan perundangundangan”. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi. Sehingga,

semakin besar jumlah temuan maka akan semakin rendah kinerja Pemerintah Daerah (Dul Muid, 2014).

Dapat dinyatakan Temuan audit BPK yaitu berupa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah. Untuk mengetahui temuan audit suatu daerah dapat dilakukan dengan menjumlahkan temuan audit.

Temuan Audit dapat diukur dengan rumus : berdasarkan penelitian (Tama dan Adi, 2018) :

$$\text{Temuan Audit} = \text{Jumlah Temuan Audit (Rupiah)}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis untuk dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:



**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sesotyaningtyas, Mirna (2012)	Independen: Leverage, Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Pajak Daerah.  Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	1. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan angka 0,108 dengan nilai signifikansi sebesar 0,915. Nilai signifikan untuk variabel leverage menunjukkan angka diatas tingkat signifikan 0,05. 2. Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,278. Nilai signifikan untuk variabel legislatif menunjukkan angka diatas tingkat signifikan 0,05. 3. <i>Intergovernmental Revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan angka 2,016	1. Variabel independen yang sama yaitu <i>Intergovernmental revenue</i> . 2. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kuantitatif. 3. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder.	1. Variabel independen yang berbeda yaitu, Leverage, Ukuran Legislatif, Pendapatan Pajak Daerah. 2. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Jawa. 3. Total populasi adalah 118 kabupaten/kota di bawah 6 provinsi. Sedangkan sampel

			<p>dengan nilai signifikansi sebesar 0,054. Nilai signifikan untuk variabel intergovernmental revenue menunjukkan angka diatas tingkat signifikan 0,05.</p> <p>4. Pendapatan pajak daerah bernilai positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan h angka 2,883 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008.</p>		<p>yang terpilih adalah sebanyak 31 Kabupaten/ Kota.</p> <p>4. Jumlah variabel x pada penelitian ini adalah 4 variabel x</p>
2.	Dul Muid, Renas (2014)	Independen: Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan daerah, Status Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK.	<p>1. Ukuran Daerah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi variabel ukuran daerah sebesar 0,03 9 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Nilai t-statistik untuk variabel ukuran daerah adalah 0,057 dengan tingkat signifikansi sebesar dengan signifikansi sebesar 0,954 (lebih &gt; 0,05).</p>	<p>1. Variabel independen yang sama yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, belanja daerah dan temuan audit BPK.</p> <p>2. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kuantitatif.</p> <p>3. Jenis data yaitu</p>	<p>1. Variable independen yang berbeda yaitu dana perimbangan.</p> <p>2. Populasi penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun</p>

		Dependen:  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>2. Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil koefisien regresi variabel tingkat kekayaan daerah sebesar 0,12564 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Nilai t-statistik untuk variabel tingkat kekayaan daerah adalah 0,02032 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,045 (kurang &lt; 0,05).</p> <p>3. Status Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil koefisien regresi variabel status daerah sebesar 0.03229 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Nilai t-statistik untuk variabel status daerah adalah 0,04538 dengan tingkat signifikansi sebesar dengan signifikansi</p>	<p>menggunakan data sekunder.</p> <p>4. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling.</p>	<p>2009-2011.</p> <p>3. Menggunakan metode Analisis regresi panel.</p> <p>4. Jumlah sampel 35 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>5. Jumlah Variabel X yaitu 6 Variabel.</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>sebesar 0,000 (kurang &lt; 0,05) .</p> <p>4. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hasil koefisien regresi variabel dana perimbangan sebesar - 0,00481 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai t sebesar -1,352 dengan signifikansi sebesar 0,180 (lebih &gt; 0,05).</p> <p>5. Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hasil koefisien regresi belanja daerah sebesar 0,04333 diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai t sebesar -0,441 dengan signifikansi sebesar 0,660. dengan tingkat signifikansi sebesar dengan signifikansi sebesar 0,954 (lebih &gt; 0,05).</p> <p>6. Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah</p>		
--	--	--	---	--	--

			daerah dengan hasil koefisien regresi sebesar $-0,01328$ menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai $t$ sebesar $0,752$ dengan signifikansi sebesar $0,454$ . (lebih $> 0,05$ ).		
3.	Armaja, Ridwan Ibrahim dan Aliamin (2015)	<p>Independen: Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan nilai koefisien regresi <math>\beta_1</math> adalah <math>-7,999</math>.</li> <li>2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan nilai koefisien regresi <math>\beta_2</math> adalah <math>-2,875</math>.</li> <li>3. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan nilai koefisien regresi <math>\beta_3</math></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Independen yang sama yaitu kekayaan daerah dan belanja daerah.</li> <li>2. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kuantitatif.</li> <li>3. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder.</li> <li>4. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Independen yang berbeda yaitu dana perimbangan.</li> <li>2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2011-2015.</li> <li>3. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 23 kabupaten/kota.</li> </ol>

			adalah 6,603.		
4.	Aziz, Asmaul (2016)	<p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah (<i>Size</i>), <i>Intergovernmental Revenue</i>, Belanja Daerah.</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Ukuran Pemerintah Daerah (<i>Size</i>) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai sig 0,016. Nilai sig 0,016 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5%.</p> <p>2. <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai sig sebesar 0,002. lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%.</p> <p>3. Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan nilai sig sebesar 0,055 lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%.</p>	<p>1. Variabel Independen yang sama yaitu Ukuran Pemerintah Daerah (<i>Size</i>), <i>Intergovernmental Revenue</i>, dan Belanja Daerah.</p> <p>2. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kuantitatif.</p> <p>3. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder.</p> <p>4. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis</p>	<p>1. populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.</p> <p>2. Sampel sebanyak 30 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2014.</p> <p>3. Jumlah Variabel X dalam</p>

				regresi linier berganda. 5. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling.	penelitian ini sebanyak 3 variabel.
5.	Sari, Indah Puspa (2016)	<p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, PAD , Leverage, Dana Perimbangan , Ukuran Legislatif.</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung <math>(2,513) &gt; t</math> tabel <math>(2,008)</math> dengan pvalue <math>(0,015) &lt; \alpha (0,05)</math>.</p> <p>2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat darinilai t hitung <math>(2,182) &gt; t</math> tabel <math>(2,008)</math> dengan pvalue <math>(0,034) &lt; \alpha (0,05)</math>.</p> <p>3. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>1. Variabel independen yang sama yaitu ukuran pemerintah daerah.</p> <p>2. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kuantitatif.</p> <p>3. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder.</p> <p>4. Metode</p>	<p>1. Variable independen yang berbeda yaitu PAD, <i>Leverage</i>, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif.</p> <p>2. Objek penelitian pada Pemerintah Daerah pada Kab/Kota Pulau Sumatra).</p>

			<p>Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung <math>(1,740) &lt; t \text{ tabel } (2,008)</math> dengan pvalue <math>(0,087) &gt; \alpha (0,05)</math>.</p> <p>4. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung <math>(4,060) &gt; t \text{ tabel } (2,008)</math> dengan pvalue <math>(0,000) &lt; \alpha (0,05)</math>.</p> <p>5. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung <math>(0,044) &lt; t \text{ tabel } (2,008)</math> dengan p value <math>(0,965) &gt; \alpha (0,05)</math>.</p>	<p>pengambilan sampel adalah purposive sampling.</p> <p>5. Jumlah Variabel X yaitu 5 Variabel.</p> <p>6. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda.</p>	<p>3. Populasi penelitian ini adalah pemerintah dan anggota DPRD kabupaten/kota di Pulau Sumatera pada tahun 2013 dengan total 154 Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Jumlah sampel 57 Kabupten/Kota.</p>
6.	Noviyanti, Nur Ade dan Kiswanto (2016)	<p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah , Tingkat kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada</p>	<p>1. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai signifikansi <math>0,611 &gt; 0,05</math>.</p> <p>2. Tingkat Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai</p>	<p>1. Variabel independen yang sama yaitu ukuran pemerintah daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah dan Temuan Audit.</p>	<p>1. Variable independen yang berbeda yaitu Tingkat Ketergantungan Pada Pusat dan Ukuran Legislatif.</p>



		<p>Pusat, Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, Temuan Audit.</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>signifikansi - <math>0,576 &gt; 0,05</math>.</p> <p>3. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai signifikansi <math>0,003 &lt; 0,05</math>.</p> <p>4. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai signifikansi <math>0,000 &lt; 0,05</math>.</p> <p>5. Ukuran Legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai signifikansi <math>0,001 &lt; 0,05</math> akan tetapi koefisien bernilai negatif.</p> <p>6. Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai signifikansi <math>0,659 &gt; 0,05</math>.</p>	<p>2. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kuantitatif.</p> <p>3. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder.</p> <p>4. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling.</p> <p>5. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda.</p>	<p>2. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2013.</p> <p>3. Jumlah sampel 43 Kabupaten/Kota di Indonesia.</p> <p>4. Jumlah Variabel X yaitu 6 Variabel.</p>
7.	Kusuma, Aulia Rizka dan Nur	<p>Independen: Ukuran Pemerintah</p>	<p>1. Ukuran Pemerintah Daerah Leverage tidak berpengaruh terhadap efisiensi</p>	<p>1. Variabel independen yang sama yaitu</p>	<p>1. Variable independen yang</p>

	Handayani (2017)	Daerah, Kemakmuran, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Leverage, Belanja Daerah.  Dependen:  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan bahwa nilai Sig. <math>0,329 &gt; 0,05</math> dan arah koefisiennya negatif.</p> <p>2. Kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah daerah dengan Nilai Sig. dari variabel Kemakmuran (WLTH) yaitu sebesar <math>0,000</math>. Karena Sig. <math>0,000 &lt; 0,05</math> dan arah koefisiennya positif.</p> <p>3. Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai Sig. sebesar <math>0,322</math>. Meskipun arah koefisiennya negatif tetapi karena nilai Sig. <math>0,322 &gt; 0,05</math>.</p> <p>4. Leverage tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah</p>	<p>Ukuran Pemerintah Daerah dan Belanja Daerah</p> <p>2. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kuantitatif.</p> <p>3. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder.</p> <p>4. Jumlah Variabel X yaitu 5 Variabel.</p> <p>5. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda.</p>	<p>berbeda yaitu Kemakmuran, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Leverage.</p> <p>2. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>3. Jumlah sampel sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2015.</p>
--	---------------------	---	--	--	--

			<p>daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja dengan nilai Sig. dari variabel Leverage (LEV) sebesar 0,224. Meskipun arah koefisiennya negatif tetapi karena nilai Sig. <math>0,224 &gt; 0,05</math>.</p> <p>5. Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja dengan memiliki nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai Sig. <math>0,000 &lt; 0,05</math>, dan arah koefisiennya positif.</p>		
8.	Nugroho, Tatas Ridho dan Novi Eko Prasetyo (2018)	<p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Belanja Daerah.</p> <p>Dependen:</p>	<p>1. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai Standardized Coefecient/Beta 0,377 dan nilai sig 0,144.</p> <p>2. Intergovernmental Revenue berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai</p>	<p>1. Variabel independen yang sama yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Belanja Daerah.</p> <p>2. Jenis penelitian ini adalah penelitian</p>	<p>1. Sampel penelitian ini adalah 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.</p> <p>2. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota</p>

		Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Standardized Coefecient/Beta 0,773 dan nilai sig 0,000. 3. Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai Standardized Coefecient/Beta -0,086 dan nilai sig 0,711.	kuantitatif. 3. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. 4. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder. 5. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Jawa Timur yang berjumlah 38 daerah. 3. Jumlah variabel X sebanyak 3 variabel.
9.	Kurnia, Dede (2020)	Independen: Temuan Audit, Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran.  Dependen: Kinerja	1. Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan menghasilkan nilai koefisien sebesar -1.172, nilai t hitung sebesar -0.524, t tabel 1.693 dan dengan signifikansi 0.605 (<0.05). 2. Opini Audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan	1. Variabel independen yang sama yaitu Temuan Audit BPK. 2. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda. 3. Jenis data yaitu	1. Variabel Independen yang berbeda yaitu Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran. 2. Populasi dalam penelitian ini adalah

		Pemerintah Daerah	<p>menghasilkan nilai koefisien <math>\beta_2</math> sebesar 7.645, nilai t hitung sebesar 2.734, t tabel 1.693 dan dengan signifikansi 0.011 (<math>p &lt; 0,05</math>).</p> <p>3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan memberi pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan menghasilkan nilai koefisien <math>\beta_3</math> sebesar -9.047, nilai t hitung sebesar -2.081, t tabel 1.693 dengan signifikansi 0.047 (<math>p &lt; 0.05</math>).</p> <p>4. Struktur Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan menghasilkan nilai koefisien <math>\beta_4</math> sebesar -7.644E-7, nilai t hitung sebesar -0.449, t tabel 1.693 dan dengan signifikansi 0.657 (<math>p &lt; 0.05</math>).</p>	<p>menggunakan data sekunder.</p> <p>4. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.</p> <p>5. Menggunakan data sekunder.</p>	<p>seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tahun 2013-2016.</p> <p>3. Sampel yang digunakan ialah 32 dari 4 tahun pengamatan (2013, 2014, 2015 dan 2016).</p> <p>4. Jumlah variabel X adalah 4 variabel.</p>
10.	Tahar, Afrizal dan Muchlis Aditya Prayoga	Independen: Transparansi, Akuntabilitas,	1. Transparansi memiliki nilai sig 0,000 < alpha 0,05 dengan nilai $\beta$ sebesar 0,376 (positif). Nilai tersebut dapat	1. Variabel independen yang sama yaitu <i>Intergovernmental</i>	1. Variabel Independen yang berbeda adalah

	(2021)	<p><i>Intergovernmental Revenue</i>, dan Kompetensi.</p> <p>Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah.</p>	<p>membuktikan H1 terdukung yang berarti bahwa “Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.</p> <p>2. Akuntabilitas memiliki nilai sig sebesar <math>0,020 &lt; \alpha 0,05</math> dengan nilai <math>\beta</math> sebesar 0,198 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H2 terdukung yang berarti bahwa “Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.”</p> <p>3. <i>Intergovernmental Revenue</i> memiliki nilai sig sebesar <math>0,037 &lt; \alpha 0,05</math> dengan nilai <math>\beta</math> sebesar 0,490 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H3 terdukung yang berarti bahwa <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.</p> <p>4. Kompetensi memiliki nilai sig sebesar</p>	<p><i>Revenue</i>.</p> <p>2. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda.</p> <p>3. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.</p>	<p>Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi.</p> <p>2. Jenis data yaitu menggunakan data primer.</p> <p>3. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.</p> <p>4. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 130 responden.</p> <p>5. Jumlah variabel X sebanyak 4 variabel.</p>
--	--------	--	--	---	--

			0,033 < alpha 0,05 dengan nilai $\beta$ sebesar 0,154 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H4 terdukung yang berarti bahwa “Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah”.		
11.	Defitri, Yulia Siska, Sindy Fetrisia dan Witra Maison (2021)	<p>Independen: Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Daerah.</p>	<p>1. Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai t tabel diketahui 2,032 dan signifikansi 0,000 dengan taraf signifikansi 5%.</p> <p>2. Dana perimbangan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 7,333 artinya t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.</p> <p>3. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah</p>	<p>1. Variabel Independen yang sama yaitu kekayaan daera dan belanja daerah.</p> <p>2. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kuantitatif.</p> <p>3. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder.</p> <p>4. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda.</p>	<p>1. Variabel Independen yang berbeda yaitu Dana Perimbangan.</p> <p>2. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi.</p> <p>3. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.</p>

			dengan nilai t hitung diperoleh 0,460 dengan signifikansi lebih dari 5%.		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pada penelitian ini menggunakan sensus sampling.</li><li>5. Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 3 variabel x.</li></ol>
--	--	--	--	--	--

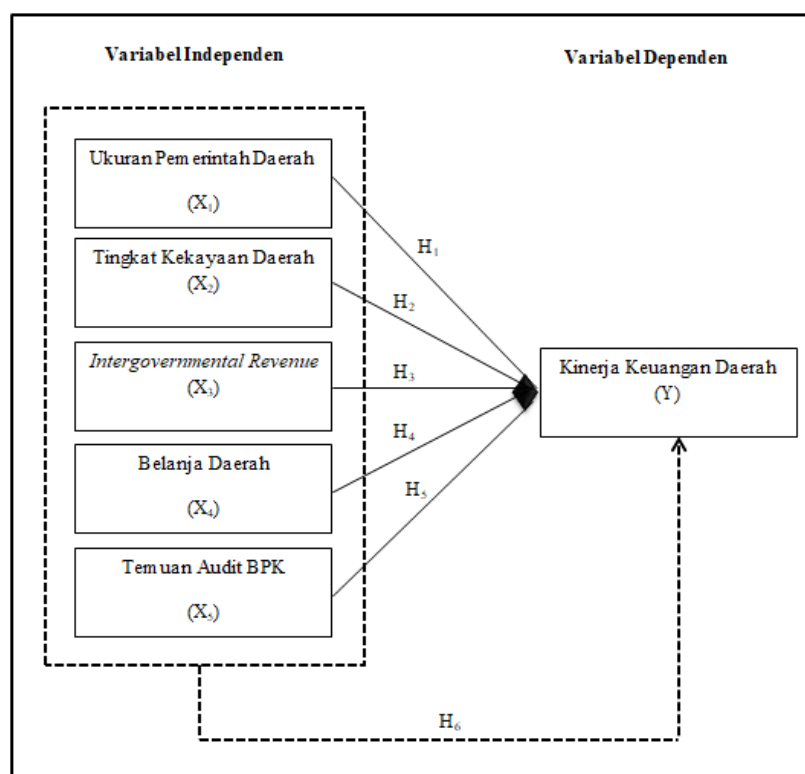
Sumber: Data yang diolah (2021)



Penulis telah memaparkan tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat kesamaan variabel yang digunakan penulis dengan beberapa penulis sebelumnya yaitu variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK. Perbedaannya terletak pada populasi dan sampel yang akan digunakan penulis. Penulis melakukan penelitian pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada lima tahun terakhir yaitu Tahun 2015-2019.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2017:60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

- : Menunjukkan secara parsial  
 -----→ : Menunjukkan secara simultan

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK mempengaruhi variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel dependen mempengaruhi variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019:95) hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian yang akan diteliti yaitu menguji apakah Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### 2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran adalah suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Jika objek tertentu dikaitkan dengan instansi atau organisasi, ukuran dapat dilihat secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. “Pemerintah daerah dengan ukuran (*size*) yang besar akan menunjang operasional dan juga memberi kelancaran dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah”. (Kusumawardani, 2012). Dengan demikian pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah daerah yang diproyeksikan dengan total asset yang besar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya sendiri dalam

rangka menjalankan otonomi daerah karena pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada publik serta mengatur dan menjalankan tugasnya dengan didukung oleh kelengkapan dan ketersediaan aset yang dimiliki. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga Ukuran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.2 Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Tingginya total kekayaan suatu daerah maka daerah tersebut sudah dapat dinyatakan baik dalam mengelola dan mengatur kinerja keuangannya karena dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar sedangkan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka daerah tersebut kurang maksimal dalam menjalankan kinerja keuangan daerahnya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga Tingkat Kekayaan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.3 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Intergovernmental revenue* adalah “Pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya

pembayaran kembali”. (Setyaningrum dan Febriyani, 2012). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Simanullang, 2013).

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Djaenuri, 2012: 100). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga *Intergovernmental Revenue* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.4 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mendefinisikan “Belanja Daerah adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang menjadi pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Menurut (Noviyanti dan Kiswanto, 2016) menyatakan bahwa “Banyaknya belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang di daerahnya”. Pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Diduga Belanja Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.5 Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Temuan audit BPK adalah berbagai jenis tindak kecurangan yang ditemukan pada laporan keuangan pemerintah pada saat dilakukan pemeriksaan

oleh BPK yang melanggar ketentuan pengendalian internal dan ketentuan perundangundangan (Sudarsana, 2013). Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin rendah kinerja Pemerintah Daerah (Dul Muid, 2014). Semakin banyak temuan audit yang diungkap oleh BPK maka dapat dinyatakan pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan kinerjanya terbilang semakin buruk. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Diduga Temuan Audit BPK secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.6 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*), Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012:144). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*), Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H6 : Diduga terdapat pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*), Tingkat Kekayaan Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.